

Jadwal Shalat Hari Ini

Subuh : 05.12 WIB
 Zuhur : 12.34 WIB
 Ashar : 15.45 WIB
 Maghrib : 18.38 WIB
 Isya : 19.47 WIB

Sumber: Kompas.com

KOMENTAR

Berharap Kembalinya PDIP ke Peran Oposisi

VIRDIKA RIZKY UTAMA

PEMILU serentak yang berlangsung pada 14 Februari 2024 mengungkap dinamika politik yang rumit. Hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden tetapi tetap unggul dalam pemilihan legislatif. Meski bukan hasil akhir, ini menandai posisi strategis PDI-P dan perannya ke depan.



Dalam pemilihan presiden, PDI-P menghadapi tantangan berat. Pasangan yang didukungnya, Ganjar-Mahfud, hanya memperoleh sekitar 16-18% suara, berada di posisi ketiga. Sementara itu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 24-26% suara, dan Prabowo Subianto memenangkan pemilu dengan 56-58% suara. Kemenangan Prabowo menandai perubahan signifikan dalam politik Indonesia, mengisyaratkan perubahan preferensi pemilih dan potensi rekonfigurasi kekuatan politik.

Meskipun kalah dalam pemilihan presiden, PDI-P menunjukkan kekuatan di pemilihan legislatif, menegaskan posisinya sebagai partai utama di kancah politik nasional. Ini menempatkan PDI-P di persimpangan penting, mendorong partai untuk meng evaluasi strategi dan mendefinisikan kembali perannya dalam lanskap politik yang berubah setelah sepuluh tahun berkuasa.

Kekalahan Ganjar-Mahfud di daerah basis tradisional PDI-P seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali menunjukkan dinamika pemilih yang kompleks yang melampaui loyalitas partai. Ini menggarisbawahi perubahan paradigma politik dan munculnya garis patahan baru di kalangan pemilih Indonesia.

Bersambung ke Hlm-7



SHALAT JUMAT DEPAN GEDUNG PARLEMEN

Para pengunjuk rasa mendengarkan khotbah sebagai rangkaian shalat Jumat di depan kompleks Parlemen, tepi Jalan S. Parman, Senayan, Jakarta, Jumat (1/3). Massa pengunjuk rasa dari sejumlah elemen tersebut memprotes pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai curang, menuntut penggantian Komisiner KPU, mendukung hak angket di DPR, dan memprotes terjadinya kenaikan harga sembako. (Antara)

4 Bansos Cair Maret Ini

JAKARTA - SINGGALANG

Pemerintah akan kembali mencairkan sejumlah bantuan sosial (bansos) jelang bulan suci Ramadan yang jatuh pada Maret 2024. Langkah ini dilakukan pemerintah untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima manfaat.



Adapun sejumlah bansos yang akan cair bulan ini mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp 600 ribu, bansos beras 10 kilogram (kg) yang sudah rutin dibagikan sejak akhir tahun lalu, dan sejumlah bansos rutin lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan

Non-tunai (BPNT).

Berikut daftar Bansos yang Cair Maret 2024 ini sebagaimana dikutip detikcom

1. BLT Mitigasi Pangan Rp 600 Ribu

Dalam catatan detikcom, Menteri Koordinator Bidang Per-

ekonomian Airlangga Hartarto sempat mengatakan pemerintah akan mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) mitigasi risiko pangan sebesar Rp 600 ribu akan cari pada Maret 2024 ini.

"Kita (pemerintah) menargetkan BLT, cash, itu bisa dicairkan sehingga membantu masyarakat untuk menghadapi gejolak kenaikan harga. Diharapkan di bulan Maret bisa dicairkan," kata Airlangga usai sidang Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2) lalu.

Perlu diketahui, pada awalnya pemerintah berencana untuk mencairkan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp 200 ribu per bulan berlaku untuk periode Januari-Februari-Maret 2024 sekaligus pada Februari ini.

Bersambung ke Hlm-7

Zakat Penghasilan
 Sumber yang bersih lebih aman, lebih barokah

Salurkan Zakat Anda melalui:

mandiri 111.000.500.4888
 an Dompot Dhuafa Singgalang

BSI 234.22222.40
 an Dompot Dhuafa Republik

Informasi: (0751) 40098 & 081267023333

www.ddsinggalang.org

Pojok

- + 4 bansos cair Maret ini
 - Puaos masak, pith tibo, galak manih rang rumah dek nyo...
- + Wapres berharap Pilkada 2024 berjalan demokratis dan jujur
 - Sajak saiusak lah iko juo isi pidato pajabak mah...

Ermaneli Gantikan Nofrizon Sebagai Anggota DPRD Sumbar



SUMPAAH DAN JANJI - Ermaneli mengucapkan sumpah dan janji dipandu Ketua DPRD Sumbar Supardi, saat dilantik sebagai anggota DPRD Sumbar periode tahun 2019-2024, Jumat (1/3). (ist)

Padang, Singgalang

Politisi Demokrat, Ermaneli resmi menjadi anggota DPRD Sumbar periode Tahun 2019-2024. Ia telah mengucapkan sum-

pah dan janji sebagai anggota dewan pada rapat paripurna di gedung DPRD Sumbar, Jumat (1/3).

Ermaneli menjadi pengganti antar waktu (PAW)

menggantikan Nofrizon. Keduanya berasal dari daerah pemilihan (dapil), Bukittinggi-Agam.

Ermaneli mengucapkan sumpah dan janji sebagai anggota DPRD dipandu oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Dalam rapat paripurna tersebut, Supardi sempat menyampaikan terima kasih kepada Nofrizon yang telah mengabdikan diri sebagai anggota DPRD Sumbar.

"Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik serta pengabdian saudara Nofrizon dengan baik."

Bersambung ke Hlm-7

Wapres Berharap Pilkada 2024 Berjalan Demokratis dan Jurdil

AUCKLAND - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap Pilkada serentak yang akan digelar November 2024 mendatang bisa berlangsung demokratis, jujur dan adil.



Ma'ruf Amin mengatakan gelaran pilkada harus berjalan dengan baik. "Saya kira supaya (Pilkada) dilaksanakan dengan baik, dengan demokratis, dengan jujur (jujur dan adil). Semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada," kata Ma'ruf usai menghadiri Business Forum with Halal Industry, di Hotel Cordis, Auckland, Selandia Baru, seperti dikutip dalam keterangannya, Jumat (1/3).

Ma'ruf Amin mengaku yakin Pilkada 2024 akan

Bersambung ke Hlm-7

Gubernur Mahyeldi Paparkan Kinerja ke BEM SB



TERIMA KUNJUNGAN - Gubernur Mahyeldi menerima kunjungan audiensi Aliansi BEM di Ruang Rapat Istana Gubernur Sumbar, Jumat (1/3). (ist)

PADANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi kepedulian Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat (BEM SB) terhadap perkembangan pembangunan di Sumbar. Karenanya, ia menegaskan setiap masukan dari mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi dalam mewujudkan Sumbar yang unggul, mandiri, dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menerima kunjungan audiensi Aliansi BEM di Ruang Rapat Istana Gubernur Sumbar,

Bersambung ke Hlm-7

Pembuat Konten Tukar Pasangan Jadi Tersangka, Langsung Ditahan



SURABAYA - Video pengajian yang memperbolehkan bertukar pasangan di akun YouTube Mbah Den (Sariden), yang merupakan milik Gus Samsudin, viral di media sosial. Polisi sudah menetapkan Gus Samsudin sebagai tersangka.

Polda Jawa Timur (Jatim) menetapkan Gus Samsudin jadi tersangka buntut viral konten video pengajian yang memperbolehkan bertukar pasangan. Gus Samsudin langsung ditahan.

"Saudara Samsudin juga hari ini dilakukan penahanan"

Bersambung ke Hlm-7

DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN SEJUTA JANJANG

Empat Terdakwa Mulai Disidangkan

PADANG - SINGGALANG

Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan objek wisata Sejuta Janjang di Kabupaten Agam menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Padang, Kamis (29/2).

Keempat terdakwa yakni Ilham sebagai konsultan pengawas, Pirdaus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bastian dan Mukhti Iliadi dari PT Bangun Pratama sebagai pekerja pembangunan proyek Sejuta Janjang.

Sidang beragendakan pembacaan dakwaan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Riki Supriadi es di hadapan keempat terdakwa yang didampingi masing-masing penasihat hukum.

Dalam dakwaan primer, menurut jaksa perbuatan keempat terdakwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum.

Proyek pembangunan Sejuta Janjang dengan pagu anggaran sebesar Rp4,2 miliar lebih berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019. Kemudian perbuatan para terdakwa disebut menimbulkannya kerugian negara sebesar Rp553.656.004,10.

"Sehingga perbuatan terdakwa diancam pidana sesuai



SIDANG - Empat terdakwa menghadiri sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi pembangunan objek wisata Sejuta Janjang, Kabupaten Agam di Pengadilan Tipikor Padang, Kamis (29/2). (ist)

pasar 2 ayat (1) Jo Pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana," kata jaksa membacakan salah satu dakwaan salah satu terdakwa.

Menanggapi hal itu, sidang yang dipimpin Hakim Ketua, Juandra didampingi Hendri Joni dan Said Hamrizal Zulfi sebagai hakim anggota menanyakan sikap terhadap dakwaan jaksa kepada dua belah pihak. Kemudian terdakwa Ilham yang didampingi penasihat hukum (PH) Febriadi Nasir dan Yudhi Rahman dari

kantor hukum Yudhi Rahman & Partners (YRP) membantah dakwaan jaksa karena tidak jelas dan samar-samar. "Kami menghormati proses persidangan. Namun kami membantah semua dakwaan terhadap klien kami dengan mengajukan bantahan (eksepsi)," kata Yudhi.

"Eksepsi yang akan kami ajukan apakah diterima atau tidaknya, kami serahkan kepada majelis hakim," kata Febriadi menambahkan.

Begitu juga dengan penasihat hukum Mukhti Iliadi yakni Mulyadi dan Muhammad Azzam Indra. Pengacara dari Kantor Hukum Independen (KHI) ini juga menyatakan akan menyampaikan eksepsi pada sidang berikutnya. Sementara satu terdakwa

Pirdaus tidak ada memakai penasihat hukum dan belum mengetahui akan melakukan eksepsi.

"Apakah anda akan memakai penasihat hukum. Sementara tiga terdakwa melakukan eksepsi, anda bagaimana," tanya Juandra kepada Pirdaus. "Saya belum tahu yang mulia akan saya tanyakan dulu kepada keluarga," jawab Pirdaus. "Jika tidak ada pengajuan pendampingan dari pihak keluarga, kami meminta Peradi Padang yang sudah MoU dengan PN Padang untuk mendampingi terdakwa Pirdaus," kata Juandra.

Hakim Ketua Juandra menunda persidangan pada Selasa (5/3) dengan agenda eksepsi yang dibacakan para penasihat hukum terdakwa. (109)

Polda Hentikan Kasus Pungutan ke Samsat

Padang, Singgalang

Polda Sumbar menghentikan penyelidikan kasus dugaan pungutan tidak sah senilai Rp5 miliar yang diduga dilakukan mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar Mazwar Dedi terhadap jajaran Pimpinan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di sejumlah kabupaten dan kota.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan, penyelidikan kasus tersebut dihentikan karena penyidik menilai kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana dan hanya merupakan kesalahan administrasi saja.

"Proses di Polda dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana serta hanya kesalahan administrasi saja," ujarnya ke pada wartawan, Kamis (29/2).

Menurut Dwi, setelah menjalani proses pemeriksaan di Polda Sumbar, Mazwar Dedi selaku terlapor, telah memiliki itikad baik untuk mengem-

balikan sejumlah uang yang pernah ia minta kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. "Ada inisiatif baik dari yang bersangkutan yang dilaporkan untuk menyelesaikan kepada yang dirugikan," jelasnya.

Ia menambahkan, karena kasus tersebut tergolong kepada kesalahan administratif, pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov Sumbar, juga telah menjatuhkan sanksi administrasi kepada yang bersangkutan. "Yang bersangkutan telah mendapatkan sanksi administrasi berupa mutasi. Untuk proses di Polda Sumbar, sudah dinyatakan selesai, penyelidikan telah dihentikan," pungkasnya.

Sebelumnya, untuk membuat terang kasus ini, Polda Sumbar telah memeriksa Mantan Kepala Bapenda Sumbar, Mazwar Dedi serta sejumlah pimpinan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten/Kota Kamis pada (14/12/2023) si-

lam.

Pemeriksaan saat itu, dilakukan untuk mengustut dugaan pungutan tidak sah yang diduga dilakukan Pejabat Bapenda Sumbar kepada jajaran pimpinan UPTD Samsat di kabupaten kota.

Kasus ini pun sempat ditangani Inspektorat Sumbar selaku instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemprov Sumbar.

Kepala Inspektorat Sumbar, Delliarti saat itu mengatakan, pihaknya bahkan telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap sejumlah pejabat Bapenda Sumbar. Pemeriksaan khusus tersebut dilatarbelakangi pengaduan yang ditujukan kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.

"Jadi, ada masuk pengaduan dari bawah, yang ditujukan kepada Gubernur. Menanggapi

pengaduan tersebut, Gubernur kemudian memerintahkan kami untuk melakukan pemeriksaan guna membuktikan apakah pengaduan tersebut benar atau tidak," ujarnya saat itu.

Laporan hasil pemeriksaan khusus di lingkungan Bapenda Sumbar yang telah dirampungkan Inspektorat, telah disampaikan kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah untuk ditindaklanjuti. Tidak lama berselang, pada awal bulan Januari 2024, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah melakukan rotasi dan mutasi pegawai besar-besaran di tubuh Pemprov Sumbar.

Sebanyak 94 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas resmi menduduki jabatan baru usai dilantik di Istana Gubernur Sumbar Jumat (5/1) lalu. Rotasi dan mutasi ASN paling mencolok saat itu, terjadi di tubuh jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar. (109)

TERKAIT DUGAAN PUNGUTAN DI BAPPEDA SUMBAR

Fraksi Gerindra Ajukan Pembentukan Pansus

Padang, Singgalang

Fraksi Gerindra DPRD Sumbar secara resmi mengajukan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas tentang dugaan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan dugaan pungutan uang di Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Sumbar.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat saat menginterupsi rapat paripurna DPRD, Jumat (1/3). Surat resmi pengusulan tersebut telah pula diserahkan Fraksi Gerindra pada Pimpinan DPRD pada saat yang sama.

Dalam interupsinya, Hidayat mengatakan pembentukan pansus ini dinilai penting karena nilai dugaan pungutan itu mencapai miliaran rupiah.

"Belum lagi kejadian ini bisa berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Masyarakat juga berpotensi menjadi malas bayar pajak, padahal APBD kita 75 persen berasal dari pajak masyarakat," tegas Hidayat.

Ia menilai hingga saat ini tidak ada kejelasan tentang kelanjutan penyelesaian permasalahan tersebut.

"Dengan DPRD membentuk pansus maka dugaan-dugaan yang terjadi di Bappeda itu bisa jelas dan terang benderang. Apalagi pansus memiliki kewenangan untuk memanggil dan mempertanyakan permasalahan ini pada berbagai pihak," tegasnya.



PARIPURNA - Pelaksanaan rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat (1/3) di gedung DPRD Sumbar. (ist)

han ini pada berbagai pihak," tegasnya.

Hidayat menegaskan, DPRD memiliki fungsi pengawasan, termasuk di dalamnya pengawasan pada OPD. Maka ia menilai sudah seharusnya DPRD mengambil langkah serius dengan membentuk pansus. Hal ini kata dia sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan transparan. Dan juga pemenuhan hak publik atas informasi yang benar dan komprehensif terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerah," tegasnya.

Ia menilai, saat ini telah terjadi tertutupan arus informasi tantandak tuntasnya informasi terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan serta dugaan pungutan uang di Bappeda.

Sebagai Ketua Fraksi, Hidayat berharap usulan pembentukan pansus yang disampaikan Fraksi Gerindra ini bisa diterima dan disepakati DPRD Sumbar secara kelembagaan.

Selain Hidayat, Anggota DPRD Sumbar M. Nurnas juga menginterupsi rapat paripurna tersebut dengan maksud yang sama.

Nurnas mengatakan ia secara pribadi mendukung pem-

bentukan pansus yang diajukan Fraksi Gerindra. "Pembentukan pansus ini penting agar semua dugaan tersebut jelas. Sehingga tidak akan lagi terulang di masa yang akan datang," tegas Politisi Demokrat ini.

Pasca menerima usulan pembentukan Pansus tersebut, Ketua DPRD Sumbar yang memimpin rapat paripurna itu mengatakan akan segera membahasnya secara kelembagaan.

"Menindaklanjuti usulan pembentukan pansus merupakan salah satu tugas dari bamus (badan musyawarah) DPRD Sumbar. Maka usulan ini akan segera dibahas pada agenda rapat Bamus berikutnya," ujar Supardi. (101)

Bupati Sijunjung Dianugeahi Baznas Award

SIJUNJUNG - Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, dianugerahi BAZNAS Award 2024 kategori Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik di Indonesia. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua Baznas RI, KH Noor Achmad, Kamis (29/2) di Ballrom Hotel Bidakara Jakarta.

Seperti disampaikan Kadis Kominfo Sijunjung, David Ronaldi, via telepon genggamnya, BAZNAS Award merupakan penghargaan tahunan yang diberikan oleh BAZNAS RI kepada individu atau lembaga yang berkontribusi dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

"Usai menerima penghargaan itu, Bapak Bupati mengucapkan terimakasih kepada Baznas Republik Indonesia yang telah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung," ujar David.

Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir menyebutkan, penghargaan yang ia terima merupakan kehormatan dan kebanggaan masyarakat Sijunjung. Semoga menjadi motivasi untuk terus peduli serta memberikan dukungan agar pengumpulan zakat terus meningkat. "Kedepannya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan Baznas Republik Indonesia, Provinsi Sumbar dan Kabupaten Sijunjung dapat terus terbangun dengan baik," ujar Benny.

Selain itu, Bupati juga mengapresiasi capaian kinerja Baznas Kabupaten Sijunjung yang telah bekerja keras dalam mensejahterakan masyarakat dan ikut membantu Pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. "Ke depan program di Baznas semakin ditingkatkan dan memberikan kemaslahatan untuk seluruh umat di Kabupaten Sijunjung," tambah Benny. (505)



BAZNAS AWARD - Bupati Sijunjung, terima Baznas Award 2024 kategori Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik di Indonesia, diserahkan oleh Ketua Baznas RI, Kamis (29/2) di Jakarta. (ist)

Nelayan Tersandung Kasus Pencabulan

PARIAMAN - Seorang ayah warga Pariaman Utara, Kota Pariaman inisial S (54) ditangkap polisi karena dilaporkan mencabuli anak kandung sendiri sejak korban duduk di bangku kelas tiga SMP.

Kapolres Pariaman, AKBP Andreanaldo Ademi mengatakan, korban mulanya dipaksa oleh S dengan ancaman akan diusir dari rumah jika menolak. Aksi bejat tersebut terungkap setelah lima tahun, saat korban berusia 19 tahun.

"Kasus ini dilaporkan saat umur korban sudah dewasa. Berawal dari ini penyidik Satreskrim mendalami kasus beserta anggota PPA yang melakukan sentuhan moril pada korban, sehingga korban mau membongkar kronologi kejadian yang berawal sejak usianya 14 tahun," ulasnya Kamis (29/2).

Ia menjelaskan, usia korban masih belia pada saat itu, sehingga takut dengan ancaman tersebut dan menuruti kemauan sang ayah. Disebutkan, tersangka juga memberi korban uang sejumlah Rp50 ribu usai melakukan persetubuhan.

Kendati berulang kali, dari keterangannya pelaku mengatakan, istrinya atau ibu kandung korban tidak mengetahui perbuatan tersebut. Pelaku yang sehari-hari nelayan tersebut memaksa korban melancarkan aksi bejatnya di dalam kamar lantai dua rumah mereka, sementara sang istri berada di lantai bawah.

"Kejadian berlangsung hingga korban masuk SMA. Saat itu, korban memilih pindah ke Medan ikut kakaknya untuk melanjutkan sekolah di sana. Namun, usai korban lulus dan kembali pulang, pelaku melakukan tindak pencabulan lagi," paparnya.

Berdasarkan keterangan korban, pelaku melakukan tindak cabul satu sampai dua kali setiap minggu. Perilaku bejat tersebut dapat terhenti setelah korban mengadu kepada pamannya hingga melaporkan tindakan itu pada pihak kepolisian.

"Dari keterangan korban pencabulan sudah terjadi belasan kali, atas laporan ini Satreskrim menindaklanjuti, meminta keterangan saksi. Setelah terkumpul barang bukti dilakukan penangkapan terhadap pelaku," ulas Kapolres. (108)

CIPTAKAN SUASANA KONDUSIF SELAMA RAMADHAN

Hendri Septa Tandatangani Pernyataan Sikap Bersama

PADANG - Walikota Padang Hendri Septa bersama tokoh organisasi masyarakat, tokoh organisasi sosial (Orsos) dan tokoh organisasi keagamaan se-Kota Padang melakukan penandatanganan "Pernyataan Sikap Bersama" di ZHM Premiere Hotel Padang, Jumat (1/3).

Hendri Septa mengatakan, penandatanganan pernyataan sikap bersama ini merupakan bentuk komitmen para pemangku kepentingan yang ada di Kota Padang, dalam mewujudkan suasana Kota Padang yang kondusif selama bulan Ramadhan.

Wako Hendri Septa menyebutkan ada 6 poin yang tertuang di dalam Pernyataan Sikap Bersama ini.

Poin pertama, menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan khususnya lingkungan di sekitar masjid/mushalla, sehingga jamaah dapat melaksanakan ibadah shalat dengan khushuk guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Kedua, mendukung upaya para niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, serta seluruh tokoh masyarakat untuk mengawasi para generasi muda dan anak kemenakannya agar tidak terlibat dalam kegiatan tawuran, balapan liar, judi, minuman keras, narkoba, LGBT, serta perbuatan maksiat lainnya.

Poin ketiga, menolak segala bentuk aktivitas yang dapat merusak ibadah puasa dan kekhusyukan dalam melaksanakan shalat tarawih di Kota Padang.

Poin keempat adalah mendukung kegiatan Program Pesantren Ramadhan bagi pelajar/siswa muslim dan pesantren di kalangan majelis-majelis taklim serta pembinaan kerohanian bagi pelajar/siswa agama lainnya di masing-masing rumah ibadah.

Poin kelima, meminta dukungan moral kepada masyarakat di lingkungan masjid/mushola untuk menciptakan suasana yang kondusif selama bulan suci Ramadhan.

Dan poin keenam, memahami keberagaman dalam kebhinekaan dan selalu menjaga serta memupuk toleransi sesama umat beragama demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (103)



Pimpinan DPRD Sumbar Aktif Temui Masyarakat

PADANG - SINGGALANG

Sebagai wakil rakyat unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terus aktif menemui masyarakat.

Hal ini dilakukan pimpinan DPRD Sumbar dalam berbagai kesempatan. Baik itu menghadiri kegiatan yang diselenggarakan pihak lain hingga mengelar pertemuan yang memang menjadi agenda rutin kedewanan seperti ketika masa reses, sosialisasi perda.

Selain itu pimpinan DPRD Sumbar juga aktif melakukan pengawasan dan peninjauan ke lapangan dalam rangka pengawasan pelaksanaan kegiatan tahunan pemerintahan. Dalam kegiatan ini, selain mengecek pembangunan infrastruktur, pimpinan DPRD juga menemui masyarakat yang menjadi penerima manfaat pembangunan tersebut. Termasuk pula untuk program pemberdayaan masyarakat.

Keikutsertaan para penggiat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Sumatera Barat (Sumbar) dalam kegiatan Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft 2024) merupakan langkah tepat untuk memproduksi produk.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi saat mengunjungi kegiatan tersebut, Rabu (28/2).

Supardi menilai Jakarta Inacraft 2024 merupakan pameran kerajinan tangan terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara yang dapat menjadi referensi bagi UMKM Sumbar.

"Tampilnya karya-karya terbaik UMKM Sumbar pada kegiatan itu akan membuka kesempatan untuk mendapat perhatian pasar global. Ini tentunya akan meningkatkan kesejahteraan UMKM Sumbar itu sendiri," ujar Supardi.

Supardi mengatakan, saat ini Pemerintahan Sumbar ber-



sama Dekranas mengikutsertakan 12 Dekranas Kabupaten/Kota dan 2 UMKM profesional mandiri pada kegiatan itu, yakni Lisa Kebaya, Henny Aldi dan makanan kuliner khas Sumbar DB Food.

"Ada banyak kekayaan keterampilan pengrajin Sumbar yang telah berhasil membuat produk dekoratif dan kerajinan yang istimewa," ungkapnya.

Supardi mengatakan, dalam sambutannya Menteri UMKM, Teten Masduki telah menyampaikan bahwa Indonesia memiliki pangsa pasar sekitar 1,25 persen dalam industri kerajinan dunia. Ia pun jumlah ini diprediksi akan terus meningkat.

"Pangsa pasar ini bisa menjadi peluang bagi pengrajin kriya untuk menguasai pasar dalam negeri," paparnya.

Supardi juga mengapresiasi pelaksanaan Inacraft 2024, yang telah beradaptasi dengan era digital, melalui konsep smart, simple, mobile, accessible, real time, dan trustworthy.

Ia berharap dengan branding Inacraft yang kuat di kawasan ASEAN, Indonesia pada Tahun 2024 dapat menumbuhkan produk handycraft Sumbar yang bisa diekspor kedepannya.

Untuk diketahui, kegiatan ini digelar untuk ke-24 kalinya di Jakarta Convention Center



(JCC), Jakarta Pusat, pada 28 Februari hingga 3 Maret.

Pameran yang diprakarsai Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia (ASEPHI) tersebut kerjasama dengan Mediatama Event. Temanya mengangkat hasil kreasi seni dan tradisi budaya Indonesia, salah satunya alat musik Tradisi Indonesia.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi menghadiri kegiatan bimbingan sosial keluarga dan pelatihan berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Angkatan II di Hotel Mangkuto Kota Payakumbuh, Minggu (25/2).

Pada sambutannya Supardi menilai langkah proaktif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi dan social, Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) merupakan sebuah terobosan yang penting. Hal ini ia nilai dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumbar.

Supardi mengatakan WRSE singkatan dari wanita rawan sosial ekonomi. Ia menilai, banyak keadaan membuat wanita yang seharusnya menjadi tulang rusuk justru menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Saya berharap pelatihan ini bisa menjadi motivasi bagi para WRSE untuk berkembang dan memunculkan inovasi us-

aha terbaru," ujarnya.

Dengan mengikuti pelatihan ini, ia berharap para ibu-ibu bisa memperoleh ilmu yang bisa membantu mereka mengembangkan usaha.

"Usia tidak membatasi kreatifitas kita untuk berpikir dan berinovasi. Justru semakin kita berusia lanjut maka semakin timbul semangat kita berkreatifitas karena tuntutan ekonomi keluarga" ungkap Supardi.

Supardi kegiatan pemberdayaan WRSE merupakan langkah konkrit Pemerintahan Sumbar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kaum wanita yang seringkali terpinggirkan dalam perekonomian.

Diharapkan, dengan adanya pelatihan ini, akan lahir lebih banyak lagi perempuan-perempuan tangguh yang mampu mandiri secara ekonomi dan memperkuat struktur keluarga serta komunitas mereka.

"Kegiatan ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat, sekaligus menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkesinambungan bagi semua lapisan masyarakat" ungkap Supardi.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumbar yang diwakili Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Rumainun mengatakan Kegiatan Bimbingan Sosial WRSE merupakan langkah

yang positif dan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan wanita dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

"Kami berharap para peserta dapat mengembangkan potensi diri mereka dan menjadi agen perubahan yang positif bagi masyarakat," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib aktif turun ke daerah, baik itu dalam rangka menemui masyarakat untuk menjemput aspirasi hingga meninjau pengerjaan infrastruktur yang dibiayai kas daerah.

Dalam beberapa waktu terakhir, diantaranya Suwirpen pergi meninjau pembangunan jalan di Kubu Kerambil, Batusangkar Kabupaten Tanah Datar.

Hal itu dilakukan Suwirpen dalam rangka pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2023.

Pada kesempatan lainnya, Suwirpen juga meninjau Panti Asuhan Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu di Kecamatan Limau Manis Kabupaten Tanah Datar. Peninjauan tersebut dilakukan Suwirpen dalam rangka pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.

Suwirpen juga sempat datang ke SMKN 1 Kota Solok.

Kunjungan ini dilakukan Suwirpen dalam rangka pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat yakni sektor pendidikan terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2023.

Sebagai wakil rakyat Suwirpen juga menjalankan kegiatan rutin perseorangan kedewanan, diantaranya seperti sosialisasi peraturan daerah (perda) dan pertemuan dengan masyarakat dalam rangka masa reses.

Salah satu kegiatan reses Suwirpen yakni pertemuan dengan masyarakat Mata Air, Kota Padang. Saat pertemuan itu, salah seorang warga mengatakan, jika curah hujan tinggi, air akan merendam pemukiman warga di empat RT. Kondisi itu telah berlangsung bertahun-tahun.

Suwirpen saat diwawancarai usai reses perorangan mengatakan, persoalan banjir memang menjadi keluhan masyarakat Kelurahan Mata Air Kota Padang, jika curah hujan tinggi, genangan air bisa mencapai dua meter. Salah satu faktor penyebabnya karena drainase yang tidak berfungsi. Namun untuk menuntaskan persoalan itu butuh anggaran yang tidak sedikit.

"Terkait banjir di Mata Air kita akan tinjau nantinya bersama bersama OPD terkait Pemprov Sumbar, jika anggarannya memungkinkan untuk diakomodir melalui Pokir maka akan kita lakukan perbaikan," kata Suwirpen.

Dia menjelaskan, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tiga fungsi, yaitu penyusunan anggaran, pembentukan peraturan daerah (Perda) hingga melakukan pengawasan terkait kinerja pemerintah daerah.

Setiap anggota DPRD memiliki anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) yang bisa dialokasikan untuk program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah. Setiap anggota DPRD wajib melaksanankan tugas pokok dan fungsinya tersebut sesuai dengan amanat Konstitusi negara. (●)



Sabtu, 2 Maret 2024 (21 Sya'ban 1445 H)

DIBERI ARAHAN JOKOWI

MenPAN-RB Kebut Bahasan Tunjangan ASN Pindah ke IKN

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne gara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas turut mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungan ke kawasan IKN. Menu rut Anas, pembangunan hunian ASN ini sangat progresif, sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

"Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ASN ke IKN pada tahap awal hingga akhir nantinya. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri PUPR dan Kepala Otorita IKN yang terus bekerja dengan efektif untuk penuntasan hunian ASN," tutur Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (1/3).

Anas mengatakan Presiden Jokowi juga mengin struksikan agar Kementerian terkait segera mendetaikkan skema insentif atau tunjangan bagi ASN yang pindah ke IKN. Tunjangan itu disebut sebagai tunjangan pionir.

"Tadi Presiden Jokowi memberikan arahan agar

Wapres Berharap ...

berjalan aman. Apalagi, kata Ma'ruf, Indonesia sudah berpengalaman menyelenggarakan pemilihan, baik itu pileg, pilpres hingga pilgub.

"Kalau itu (Pilkada jurdil) terjadi, saya kira akan aman, mudah-mudahan. Kita sudah berkali-kali (menghadapi) Pileg, Pilpres, Pilgub, Pilbup, itu sebenarnya sudah beberapa kali,"

Ermaneli Gantikan ...

lasan yang berlipat ganda," kata Supardi.

Kepada Ermaneli selaku pengganti Nofrizon, Supardi mengucapkan selamat bergabung di DPRD Sumbar. "Kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Sumbar mengucapkan selamat bertugas semoga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," kata Supardi.

Ia mengatakan proses PAW Ermaneli telah

Berharap Kembalinya ...

Di sisi lain, kinerja konsisten PDI-P dalam pemilihan legislatif membuktikan kekuatan dan ketahanan partai. Berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas, PDI-P memimpin dengan 17-18% suara, diikuti Golkar, Gerindra, dan PKB. Ini memberikan platform bagi PDI-P untuk mengkalibrasi ulang strategi politiknya dan menegaskan kembali pengaruhnya sebagai oposisi yang kuat.

Penyeimbang Pemerintah

Kemenangan legislatif PDI-P sangat penting di tengah naiknya Prabowo ke kepresidenan, yang bisa menandakan pergeseran ke arah otoritarianisme kompetitif di Indonesia. Otoritarianisme kompetitif, yang ditandai dengan kompetisi elektoral semu sambil mengikis prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, mengingatkan kita pada lintasan politik di Rusia di bawah Vladimir Putin.

Dalam situasi ini, peran PDI-P sebagai penyeimbang pemerintah yang berkuasa sangat diperlukan untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Kekhawatiran akan pergeseran ini didasari oleh faktor-faktor seperti dugaan kecurangan pemilu, seperti yang ditunjukkan dalam film Dirty Vote yang mengungkap upaya manipulasi hasil pemilu, dan latar belakang Prabowo sebagai mantan menantu Soeharto serta catatan pelanggaran HAM-nya, yang menimbulkan pertanyaan tentang komitmennya terhadap demokrasi.

Selain itu, ada kecenderungan di antara beberapa pendukung Prabowo untuk membungkam kritik dengan cara melaporkan para kritikus ke polisi. Hal ini menunjukkan kurangnya toleransi terhadap kebebasan berekspresi, yang merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Gabungan dari faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kepresidenan Prabowo berpotensi membawa Indonesia ke arah pemerintahan yang lebih otoriter, di mana ada semacam kompetisi elektoral tetapi inti dari demokrasi tergerus.

Dalam situasi kritis seperti ini, posisi yang dimiliki PDI-P sebagai oposisi sangat berharga. Dengan perwakilan yang signifikan di lembaga legislatif, PDI-P memiliki peluang untuk memperjuangkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam demokrasi. Partai ini bisa memanfaatkan pengaruhnya di legislatif untuk mengawasi kebijakan pemerintah, mendorong reformasi, dan memobilisasi dukungan publik untuk prinsip-prinsip demokrasi.

Kembalinya PDI-P ke posisi oposisi setelah satu dekade berkuasa memberikan kesempatan untuk mendefinisikan kembali identitas politiknya dan terhubung kembali dengan basis dukungannya di akar rumput. Dengan memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan ekonomi, dan inklusivitas politik, PDI-P dapat meningkatkan daya tarik ideologisnya dan memperkuat posisinya sebagai pelopor demokrasi di Indonesia.

Bagi PDI-P, merangkul peran sebagai partai oposisi bukan hanya soal keseimbangan legislatif, tetapi juga tentang prinsip ideologis dan komitmen historis partai untuk memperjuangkan masyarakat Indonesia yang kurang mampu dan terpinggirkan. Kecenderungan kiri PDI-P, yang terinspirasi oleh pemikiran Sukarno atau Marhaenisme, menekankan pada keadilan sosial, nasionalisme, dan pemberdayaan rakyat kecil atau "marhaen". Sikap ideologis ini secara alami menempatkan PDI-P sebagai partai yang dapat secara efektif mengkritik dan menyeimbangkan kebijakan-kebijakan yang mungkin mendukung kepentingan elit atau merugikan kesetaraan sosial.

Kembalinya PDI-P ke peran oposisi juga sesuai dengan karakteristik partai sebagai organisasi dengan basis akar rumput yang militan dan loyal. Jaringan akar rumput ini, yang telah dibangun selama beberapa dekade, memberikan PDI-P platform yang kuat untuk

SAMBUNGAN

Gubernur Mahyeldi ...

Jumat (1/3). Dalam kesempatan itu, Mahyeldi dan mahasiswa membahas kinerja, capaian, serta rencana percepatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemprov Sumbar ke depan.

"Alhamdulillah, kami apresiasi kepedulian mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SB, yang turut serta menyigi, mengawasi, dan mendukung percepatan kemajuan pemba ngunan di Sumbar," ucapnya.

Segala masukan yang disampaikan akan menjadi catatan penting bagi Pemprov Sumbar. Dalam rangka mengevaluasi kinerja selama tiga tahun terakhir.

Termasuk mempersiapkan rencana strategis percepatan pembangunan Sumbar untuk masa yang akan datang. Agar visi mewujudkan Sumatera Barat yang unggul, madani, dan berkelanjutan, dapat terealisasi secara optimal.

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi menampung berbagai pertanyaan dari perwakilan Aliansi BEM, seperti pemaksimalan kawasan Masjid Raya Sumbar sebagai pusat penerapan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, kelangkaan pupuk, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya.

"Masjid Raya Sumbar adalah kebanggaan kita bersama, dan menjadi salah satu ikon Ranah Minang. Terlebih dalam kompleks Masjid raya juga ada Gedung LKAAM, Gedung Bundo Kanduang, hingga Perpustakaan. Ke depan, juga akan kita bangun Gedung MUI, pusat pendid kan, dan lain sebagainya. Sehingga, selain pusat keagamaan, kawasan ini juga kita jadikan pusat kebudayaan dan pendidikan Islam," ujarnya.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, sambung Gubernur, Pemprov Sumbar telah mela kukan kajian bersama perwakilan Kerajaan Arab Saudi, untuk membentuk kerja sama Sister Province.

Ia berharap, langkah ini akan dapat memper cepat realisasi kawasan Masjid Raya Sumbar sebagai pusat penerapan ABS-SBK, yang juga tindak lanjut dari pelaksanaan amanat dalam Undang-Undang No. 17 tentang Sumatera Barat.

Ada pun terkait perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, Gubernur Mahyeldi mengaku hampir setiap bulan berkeliling Sumbar untuk meninjau sarana jalan di seluruh kabupaten/kota, sekaligus meninjau sarana jembatan, irigasi, dan infrastruktur penting masyarakat lainnya.

Salah satunya, seperti peninjauan Jalan Lintas Payakumbuh-Sitangkai ruas Labuah Gunuang, di

Pembuat Konten ...

di rumah tahanan Polda Jawa Timur," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, dilansir detikJatim, Jumat (1/3).

Dirmanto mengatakan penetaan tersangka pada Pimpinan Padepokan Nur Dzat Sejati di Desa Rejowinangun, Blitar, ini usai pihaknya dan Polres Blitar melakukan gelar perkara.

"Jadi perlu kami sampaikan, penyidik gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jatim Subdit V Siber dan Polres Blitar terus berkolaborasi dan bersinergi untuk melakukan mendalami kasus ini," ungkap Dirmanto.

"Konstruksi peristiwa sudah didapatkan dan terkait itu sudah digelarkan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim dan dinyatakan bahwa hari ini saudara Samsudin dinyatakan sebagai tersangka," imbuhnya.

Calon Tersangka Lain

Polisi menyebut akan ada tersangka baru. Gus Samsudin dan 2 orang lainnya yang berperan dalam membuat video tersebut sudah diperiksa. Dari hasil pemeriksaan terhadap 13 saksi,

4 Bansos Cair ...

Dengan begitu masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 600 ribu.

Namun pencairan ini bantuan ini terkendala penganggaran yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos), sehingga tidak bisa dilakukan pada Februari ini. Karena hal ini jugalah pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengundur pencairan BLT Pangan menjadi bulan depan yang juga bertepatan dengan bulan puasa di mana harga pangan kerap mengalami kenaikan harga.

2. Bansos Beras 10 Kilogram

Berdasarkan catatan detikcom, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan pemerintah akan terus menyalurkan bantuan pangan beras 10 kilogram untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan hingga Juni 2024 nanti. Artinya di bulan Maret pemerintah masih akan mencairkan bansos itu untuk masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan ini sendiri telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 lalu. Pada dasarnya bantuan itu ditujukan membantu para penerima, tetapi juga menjaga stabilitas harga pangan.

Di luar itu Jokowi memberikan sinyal bahwa bantuan pangan beras bisa berlanjut setelah Juni 2024. Namun hal ini belum bisa dipastikan, karena belum ada keterangan resmi darinya.

"Maret terima lagi? Belum, tetapi akan terima lagi, April akan terima? Mei terima lagi? Juni terima lagi? Tidak setuju tunjuk jari? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ibu-ibu dan bapak-bapak menerima 10 kg, 10 kg, 10 kg," kata Jokowi di Gudang Bulog Batangase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2) lalu.

Jokowi mengatakan akan melihat anggaran negara atau APBN terlebih dahulu, terkait apakah bantuan beras akan dilanjutkan setelah Juni 2024. Jika anggaran cukup, dia pun menggerakkan tangannya seraya kemungkinan akan dilanjutkan bantuan pangan beras.

"Nanti setelah Juni saya akan lihat lagi APBN kita kalau cukup (tangannya mengkode meneruskan) saya nggak janji loh (sembari tertawa)," tambah Jokowi.

3. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bantuan sosial yang satu ini selalu diberikan pemerintah setiap tahun.

PKH sendiri telah diluncurkan sejak tahun

SINGGALANG ·Hlm-7

Kec. Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, yang dilaporkan rusak cukup parah.

"Lalu setelah kita cek, ternyata penyebab rusaknya karena jalan dilindiadi oleh dump truck bermuatan 30 ton lebih setiap jam, yang jelas tidak sesuai dengan peruntukan jalan kelas III. Lalu, solusi yang diputuskan adalah, perusa haan pemilik truk kita mintai pertang gungja waban untuk memperbaiki. Akhirnya, diperbaiki, dan tidak boleh lagi dilewati oleh kendaraan dengan tonase melebihi aturan 8 ton," ucap Gubernur lagi.

Ada pun terkait masalah kelangkaan pupuk, Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa masalah itu bukan hanya terjadi di Sumbar, melainkan merupakan masalah nasional. Oleh karena itu, solusi tepat untuk mengatasi masalah itu adalah melakukan pengalihan ke pupuk substitusi.

Pemprov Sumbar terus melatih masyarakat dalam pengolahan sampah menjadi pupuk organik, serta membudidayakan magot.

"Selain itu untuk menunjang produktivitas sektor pertanian, kita juga sedang fokus mensosia lisasikan potensi atau peluang budidaya madu kelulut (galo-galo) dan madu apis, yang bisa men jadi bahan olahan propolis hingga sabun mandi. Kita sudah memberdayakan banyak petani hutan untuk berternak madu kelulut, sampai saat ini sudah mencapai 4.500 stup atau kotak sarang," ujar Gubernur lagi.

Di samping itu, Gubernur Mahyeldi juga menerangkan perkembangan pertumbuhan ekonomi selama masa tiga tahun kepemimpinan dirinya bersama Wakil Gubernur Audy Joinaldy. Gubernur menerangkan bahwa secara umum Pertumbuhan Ekonomi Sumbar tercatat meng alami peningkatan dari tahun ke tahun dan semakin merata.

Selain itu, sektor krusial lain yang menjadi perhatian utama Pemprov Sumbar adalah sektor pendidikan dan pengentasan daerah tertinggal. Gubernur menyebutkan, fokus pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) berupa SMA dan SMK sudah terealisasi beberapa unit di berbagai kabupaten di Sumbar. Ditargetkan, menjelang tahun 2025 Sumbar sudah memiliki 15 unit sekolah baru.

"Sementara itu terkait pengentasan daerah tertinggal, kita masih memiliki 8 desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemarin, kita rapat koordinasi khusus langsung di Men tawai, bersama perwakilan 4 Kementerian, In stansi Vertikal di Sumbar, seluruh OPD Pemprov Sumbar, dan Pemkab Mentawai. Ini adalah upa ya kita untuk menolkan jumlah desa tertinggal di Sumbar," ucap Gubernur menutup. **(104)**

polisi telah menetapkan Samsudin sebagai tersangka dan telah menahan Gus Samsudin. Namun polisi juga menyebut akan ada tersangka selain Gus Samsudin.

"Calon tersangka yang lain ada, tapi kita masih mendalaminya sejauh mana. (Saat ini) 1 tersangka tapi calon tersangka lain sudah ada namanya," ujar Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampubolon kepada awak media, Jumat (1/3).

Polisi masih mendalami peran masing-masing dari Gus Samsudin dan rekan-rekannya. Meskipun konten yang dibuat Samsudin ini disebut merupakan konten fiktif, itu tetap bertentangan dengan undang-undang dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Kita sekarang masih fokus ke Samsudin yang membuat dan rekannya yang membantu membuat video tersebut dan upload ke media sosial sehingga menyebabkan keonaran," kata Charles.

"Meskipun itu fiksi, skenario, atau sandiwara, tapi dalam undang-undang itu diatur tidak bisa dilakukan karena membuat resah di masyarakat," tandas Charles. **(9)**

2007. Program ini dirancang untuk mengatasi masalah kemiskinan. Penerima manfaat PKH adalah Keluarga Miskin (KM) yang telah memenuhi syarat tertentu.

Dalam catatan detikcom bantuan sosial PKH biasanya dicairkan dalam empat tahap setiap tiga bulan, termasuk pada Januari 2024 ini yang merupakan bagian dari pencairan tahap pertama.

Untuk besaran dana yang dicairkan setiap bulan berbeda-beda tergantung golongan penerima manfaat. Terdapat 7 golongan yang berhak PKH, yaitu:

- Kategori balita usia 0-6 tahun mendapat bantuan dengan sebesar Rp3 juta per tahun atau Rp 750 ribu setiap tahap.

- Kategori ibu hamil dan masa nifas mendapat bantuan dengan sebesar Rp 3 juta per tahun atau Rp 750 ribu setiap tahap.

- Kategori siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) mendapat bantuan dengan sebesar Rp 900 ribu per tahun atau Rp 225 ribu setiap tahap.

- Kategori siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan sebesar Rp 1,5 juta per tahun atau Rp 375 ribu setiap tahap.

- Kategori siswa jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapat bantuan dengan sebesar Rp 2 juta per tahun atau Rp 500 ribu setiap tahap.

- Kategori lansia berusia 70 tahun ke atas mendapat bantuan dengan sebesar Rp 2,4 juta per tahun atau Rp 600 ribu setiap tahap.

- Kategori penyandang disabilitas berat mendapatkan bantuan dengan sebesar Rp 2,4 juta per tahun atau Rp 600 ribu setiap tahap.

4. Bantuan Pangan Non-tunai

Bantuan Pangan Non Tunai atau disebut juga BPNT adalah bansos lain yang secara rutin diberikan pemerintah setiap tahunnya. Bansos ini merupakan hasil dari transformasi program bantuan sosial beras yang terjadi di 2017.

Dalam catatan detikcom yang mengutip dari laman Kementerian Sosial, penerima dari BPNT dapat menggunakan dananya untuk membeli setiap kebutuhan pokok. Uang dari BPNT tidak bisa diambil dalam bentuk tunai.

Pencairan sendiri dilakukan setiap bulan, termasuk Januari 2024, melalui rekening bank Himbara penerima manfaat atau melalui PT Pos Indonesia. Besaran yang diterima tiap bulannya Rp 200.000 atau Rp 2.400.000 dalam satu tahunnya.

BPNT sendiri hanya disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong dalam 25% terbawah dari Data Terpadu Kesejah-teraan Sosial (DKTS). Kata terbawah di sini, merujuk kepada keluarga dengan kemampuan ekonomi yang tidak mencukupi atau rendah. **(9)**